

PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PROSES MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU

Susanti

Badan Kepegawaian Daerah Kab. Sanggau,
Jln. K.H. Dewantara No. 367 Sanggau, Telp (0564)21192,
Email: santiardiansyah@gmail.com

Influence of Citizen Participation on the Process of Development Planning at Kapuas Sub-district, Sanggau

The research aims at investigating the level of citizen participation in the process of sub-district development planning, analyzing the process of the planning and decision making, and examining the influence of citizen participation on the process of sub-district development planning at Kapuas Sub-district, Sanggau. It employs quantitative, explanatory method. The instruments of the research comprise questionnaires, interview, and documentation study.

The research result shows that citizen participation in Kapuas Sub-District in the process of sub-district development planning is a bit low. It also reveals that the process of the planning and decision making is unfavorable.

Through quantitative approach, it can be concluded that there is a strong correlation between citizen participation and the process of sub-district development planning. Meanwhile, the hypothesis testing proves that citizen participation positively and significantly influences the process of sub-district development planning.

Keywords: citizen participation, development, development planning

A. LATAR BELAKANG

Kebijakan desentralisasi merupakan strategi baru yang membawa harapan dalam memasuki era reformasi, globalisasi serta perdagangan bebas. Hal-hal pokok yang menjiwai lahirnya desentralisasi adalah demokratisasi, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat serta terpeliharanya nilai-nilai keanekaragaman daerah.

Ditetapkannya undang-undang tentang desentralisasi karena kebijakan ini dipandang sebagai jalan baru untuk menciptakan suatu tatanan yang lebih baik dalam sebuah skema *good governance* dengan segala prinsip dasarnya. Melalui paradigma *good governance* sebagai alternatif penyelenggaraan pemerintahan, potensi masing-masing *stakeholders* dapat diaktualisasikan dalam mengatasi berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Seiring dengan adanya keinginan untuk mewujudkan paradigma *good governance* tersebut, maka sistem penyelenggaraan pemerintah daerah di era otonomi saat ini hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan pemberdayaan, pelayanan, transparansi dan akuntabilitas, partisipasi, kemitraan, desentralisasi, konsistensi kebijaksanaan dan kepastian hukum.

Perencanaan menjadi salah satu syarat untuk mengembangkan pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*), sebab perencanaan merupakan proses awal

sebelum langkah-langkah yang bakal mempengaruhi kehidupan masyarakat berjalan. Asumsi ini didasarkan pada pemikiran bahwa jika dalam perencanaan telah dengan sengaja mengabaikan suara rakyat, maka dengan sendirinya langkah-langkah yang akan diciptakan bisa mengancam kehidupan masyarakat. Sebaliknya, jika perencanaan disusun dengan melibatkan masyarakat, maka besar kemungkinan akan mendekatkan kegiatan pemerintahan dan pembangunan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip dan tujuan pelaksanaan otonomi daerah yakni pengembangan kehidupan demokrasi, pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas serta meningkatkan peran serta masyarakat.

Namun demikian, kenyataan empirik menunjukkan adanya fenomena-fenomena dimana partisipasi masyarakat, khususnya dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan yang terjadi di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, kurang optimal.

Adapun fenomena-fenomena tersebut diantaranya: pertama, partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan pemikiran terkadang masih ada yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan dan tujuan tertentu. Contohnya: kontraktor yang mempengaruhi kepala desa agar mengutamakan program perbaikan jalan dalam musrenbang padahal tahun sebelumnya telah dilakukan perbaikan jalan, hal ini dilakukan karena adanya iming-iming dari kontraktor apabila program tersebut dapat terwujud.

Kedua, masih ada masyarakat yang kaya kultur adat tidak sepatutnya dalam aturan main pembangunan karena lemahnya rasa memiliki sebagai akibat tidak diikutsertakan dalam tahapan penyusunan formulasi pembangunan. Contohnya masyarakat di Dusun Engkalet Desa Lintang Pelaman yang bersikap masa bodoh terhadap program pembangunan yang masuk ke dusun mereka.

Ketiga, masih adanya anggapan masyarakat bahwa perencanaan pembangunan itu hanya ide pemerintah semata, sehingga berdampak kurangnya kesadaran peran serta tenaga untuk bergotong royong dalam proyek swadaya kalau tidak dibayar. Contohnya masyarakat di Desa Lape untuk mengangkat semen yang bertujuan untuk memperbaiki jalan setapak, mereka meminta upah per sak Rp. 1.000,-.

Keempat, partisipasi masyarakat khususnya masyarakat di Kecamatan Kapuas dalam pembangunan meskipun ada akan tetapi peran sertanya adalah kewajiban yang terpaksa. Contohnya mereka membayar pajak karena takut apabila tidak dibayar akan terkena denda dari pemerintah.

Kelima, selama ini program perencanaan pembangunan daerah yang dibuat masih didominasi kepentingan elit politik dari pada mengakomodir aspirasi masyarakat, atau hanya dilakukan di tataran formalitas saja misalnya melalui kegiatan musrenbang yang diikuti oleh representatif warga yang cenderung tidak representatif.

Fenomena-fenomena tersebut menjadi penting bila diletakkan dalam premis apabila partisipasi masyarakat dapat berjalan dengan baik, maka akan membentuk siklus tahapan perencanaan pembangunan daerah yang aspiratif lebih baik dan kuat dengan dukungan moral kedaulatan warganya. Namun apabila terjadi sebaliknya maka perencanaan pembangunan akan sulit mendapat dukungan dari masyarakat.

B. LANDASAN TEORITIS

Untuk memperjelas substansi penelitian ini, peneliti akan menguraikan beberapa teori dan konsep kunci yang berhubungan langsung (*direct relevance*) dengan fenomena permasalahan yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya.

1. Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan sebagai sebuah disiplin ilmu, pada dasarnya tidak dapat

dipisahkan dari disiplin ilmu utamanya yaitu ilmu administrasi negara. Hal ini dapat dianalisa dari pendapat yang dikemukakan oleh Weidner (Soeprapto, 2000: 27) menyangkut hubungan antara administrasi negara dan administrasi pembangunan, yaitu: *Development administration : public administration with a special purpose. Administration with the objective of political, economies, and social development. Development administration is the process of guiding an organization toward achievement of development objectives.* (Administrasi pembangunan merupakan bagian dari administrasi negara yang memiliki fungsi khusus dalam bidang pembangunan politik, ekonomi dan sosial. Administrasi pembangunan merupakan proses yang menuntun suatu organisasi untuk mencapai tujuantujuan pembangunan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa administrasi pembangunan sebagai bagian dari administrasi negara lebih berorientasi kepada berbagai persoalan pembangunan dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah sebuah negara).

Administrasi pembangunan merupakan sebuah kegiatan yang bersifat kompleks menyangkut hubungan dan keterkaitan antara unit-unit penyelenggara kegiatan pembangunan di suatu negara. Administrasi pembangunan merupakan usaha yang dilakukan oleh suatu pemerintah negara untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari kegiatan pembangunan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Gant (Badri, 1983: 28), yakni: *Development administration is the term used to denote the complex agencies, management systems, and the processes a government establishes to achieve its development goals. It is the adjusment of the bueraucracy to the fastly increased number, variety and complexity of government functions required to respond to the public demands for development. Development administration is the administration of policies, programs, and projects to serve development purposes.* (Adminstrasi pembangunan merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menjelaskan badan-badan yang kompleks, sistem-sistem manajemen, dan proses-proses yang dibangun oleh sebuah pemerintah dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pembangunannya. Istilah ini merupakan penyesuaian dari birokrasi untuk meningkatkan secara cepat jumlah, keragaman dan kompleksitas dari fungsi-fungsi pemerintahan yang dibutuhkan untuk menanggapi permintaan masyarakat terhadap pembangunan. Administrasi pembangunan adalah administrasi dari berbagai kebijakan, program-program, dan berbagai proyek untuk mewujudkan berbagai manfaat pembangunan).

Menurut Tjokroamidjojo (1978: 10-11) pendekatan yang dilakukan untuk memahami pengertian administrasi pembangunan didasarkan pada dua ciri pokok yang terkandung dalam pengertian administrasi pembangunan, yaitu: (a) Orientasinya kepada usaha-usaha ke arah perubahan-perubahan keadaan yang dianggap lebih baik. Bahkan diarahkan untuk membantu dan mendorong ke arah perubahan-perubahan besar (*basic changes*), merintis perubahan (*initiate changes*) dan melakukan perubahan (*innovate*); (b) Perbaikan dan penyempurnaan administrasi dikaitkan dengan aspek-aspek perkembangan di bidang-bidang lain seperti ekonomi, sosial, politik dan lain-lain. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa administrasi pembangunan merupakan upaya pengembangan administrasi negara ke arah pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. Munculnya ciri administrasi pembangunan sebagai sebuah pendekatan didasari oleh adanya pemahaman terhadap konteks pembangunan sebagai suatu perubahan terencana yang disatu sisi mencakup berbagai kebijakan serta memiliki berbagai program yang harus diimplementasikan oleh organisasi-organisasi pemerintahan.

2. Perencanaan dan Perencanaan Pembangunan

Perencanaan hakikatnya adalah proses pengambilan keputusan atas sejumlah pilihan mengenai sasaran dan teknik yang akan dilaksanakan di masa datang guna mencapai

tujuan yang dikehendaki serta pemantauan/penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaannya dan dilakukan secara sistematis berkesinambungan. Sebagai salah satu fungsi yang umum digunakan dalam siklus manajerial, Brown (Suwatno, dkk, 2002: 15) memberikan batasan perencanaan (*planning*) sebagai: "Sebuah perilaku yang berhubungan dengan kenyataan, membuat dan menggunakan asumsi-asumsi yang berhubungan dengan waktu yang akan datang dalam menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diusulkan dengan penuh keyakinan untuk tercapainya hasil yang dikehendaki".

Perencanaan merupakan dasar serta landasan atau titik tolak dalam melaksanakan tindakan-tindakan administrasi dan manajemen. Di dalam perencanaan inilah dirumuskan dan ditetapkan seluruh aktivitas administrasi dan manajemen. Perencanaan menurut Robbins (1998: 78) "harus berisikan tentang apa yang dilakukan dan bagaimana/kapan harus dilakukan, serta siapa yang melakukan".

Di sisi lain sejalan dengan topik yang dibahas, Friedmann (1987: 12) mendefinisikan lebih luas mengenai *planning* sebagai: Upaya menjembatani pengetahuan ilmiah dan teknik (*scientific and technical knowledge*) kepada tindakan-tindakan dalam domain publik, menyangkut proses pengarahan sosial dan proses transformasi sosial.

Pemikiran tersebut berfilosofi pentingnya peran serta masyarakat dalam perencanaan yang mengalami pergeseran dari untuk orang dan masyarakat sebagai sifat perencanaan *social reform* menjadi oleh orang dan masyarakat sebagai sifat perencanaan dalam *social learning*. Perspektif sektor pembangunan menurut Tjokroamidjojo (1996: 67) menyatakan bahwa "sistem perencanaan dan penganggaran merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang lebih luas". Perencanaan pembangunan jangka panjang dijabarkan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Secara fungsi, perencanaan terkait konsep kebijaksanaan dimana perencanaan merupakan: Metode praktis, sebab alat pendekatan yang sistematis dan ilmiah. Dalam arti sempit perencanaan merupakan kegiatan persiapan dalam perumusan kebijaksanaan, sedang dalam arti luas mencakup perumusan kebijaksanaan, penetapan kebijaksanaan dan kebijaksanaan pelaksanaannya. Dikotomi pemikiran ini timbul karena bermacam-macamnya teori perencanaan. (Grijns dalam Syafrudin, 1993: 22). Pemikiran di atas memberikan pengertian akan arti perencanaan sebagai proses pemikiran terhadap aktivitas-aktivitas yang perlu dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Beragamnya konsep perencanaan ini, dikarenakan banyaknya pemikir yang merumuskan batasannya dan luasnya lingkup dimensi perencanaan itu sendiri. Ini dipertegas Waterston (Bryant dan White, 1987: 305) konteks praktisi pembangunan dengan menganalogi secara ekstrim bahwa "konsep perencanaan sebagai konsep yang licin, sulit dipegang, lebih banyak digembar-gemborkan dari pada prakteknya, lebih sering didiskusikan ketimbang didefinisikan". Pemikiran ekstrim ini memberikan gambaran paradoksal akan suatu perencanaan, semakin kita membutuhkannya maka semakin kurang mampu kita melakukannya. Namun Bryant dan White (1987: 307) beranggapan perencanaan sering diartikan sebagai "penetapan tujuan-tujuan dan prioritas-prioritas serta serangkaian kegiatan untuk mencapainya".

Sedangkan Riyadi dan Bratakusumah (2003: 3) mengemukakan unsur perencanaan meliputi: "Adanya asumsi-asumsi didasarkan fakta-fakta, adanya alternatif-alternatif penentuan kegiatan, adanya tujuan ingin dicapai, bersifat memprediksi, adanya kebijaksanaan". Adapun LAN-DSE (Riyadi dan Bratakusumah, 2003: 3), mengidentifikasi unsur perencanaan sebagai berikut: "Perencanaan berarti memilih atau membuat pilihan, perencanaan berarti pengalokasian sumber daya, perencanaan berorientasi atau alat untuk mencapai tujuan, perencanaan berhubungan dengan masa yang akan datang, perencanaan merupakan kegiatan yang terus-menerus (kontinyu).

Menurut UU Nomor 25 Tahun 2004, perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yaitu, tahap penyusunan rencana, tahap penetapan rencana, tahap pengendalian pelaksanaan rencana, dan tahap evaluasi pelaksanaan rencana.

Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari empat langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (*stakeholder's*) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Tahap penetapan rencana merupakan tahap penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya.

Tahap pengendalian pelaksanaan rencana dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana.

Tahap evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan.

Keempat tahap diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Sementara itu, Tarigan (2005: 7-8) merumuskan susunan tahapan yang lebih umum untuk kebutuhan perencanaan wilayah (*spatial*) di Indonesia dengan langkah-langkah perencanaan berikut: pertama, gambaran kondisi saat ini dan identifikasi persoalan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang dengan didukung data informasi sekunder dan primer. Kedua, tetapkan visi, misi dan tujuan dilandasi komitmen kesepakatan sejak awal. Ketiga, identifikasi pembatas dan kendala yang sudah ada saat ini maupun diperkirakan akan muncul pada masa mendatang. Keempat, proyeksikan berbagai variabel yang terkait, baik yang bersifat dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan. Kelima, tetapkan sasaran yang diperkirakan yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu, yaitu tujuan yang dapat diukur. Keenam, mencari dan mengevaluasi berbagai alternatif untuk mencapai sasaran tersebut, dengan memperhatikan keterbatasan dana dan faktor produksi. Ketujuh, memilih alternatif terbaik, termasuk menentukan berbagai kegiatan pendukung yang akan dilaksanakan. Kedelapan, menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan. Kesembilan, menyusun kebijakan dan strategi agar kegiatan pada setiap lokasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Adapun Musyawarah Perencanaan Pembangunan, yang biasa disingkat Musrenbang, menurut UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Musrenbang merupakan musyawarah yang diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJP Nasional untuk pusat dan RPJPD untuk daerah yang diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintah dengan mengikutsertakan masyarakat.

Dalam penelitian ini kegiatan musrenbang tingkat kecamatan termasuk ke dalam tahapan penyusunan rencana yang menggunakan pendekatan bawah-atas (*bottom-up*), karena proses penyusunan rencananya melalui musyawarah yang dilaksanakan di tingkat kecamatan dan selanjutnya hasil musyawarah tersebut akan dibawa ke jenjang yang lebih

tinggi yaitu musrenbang tingkat kabupaten.

3. Partisipasi Masyarakat

Keberhasilan upaya perencanaan pembangunan dan stabilitas berpemerintahan amatlah bergantung dari partisipasi aktif masyarakat itu sendiri. Pengertian partisipasi sangat luas oleh karena itu, para pakar ilmuwan mengartikan partisipasi menurut disiplin ilmunya masing-masing. Secara etimologi kata partisipasi pada Ensiklopedia Administrasi dalam Priata (1983: 240), adalah sebagai berikut: "*Participation* atau pengikutsertaan adalah suatu aktivitas untuk membuktikan perasaan diikutsertakan dalam kegiatan organisasi atau ikut sertanya bawahan dalam kegiatan organisasi".

Secara konseptual, partisipasi merupakan alat dan tujuan pembangunan. Sebagai alat dan sarana pembangunan, partisipasi berfungsi sebagai penggerak dan pengarah proses perubahan sosial berencana, demokratisasi kehidupan sosial ekonomi dan politik yang berasaskan pemerataan dan keadilan sosial, pemerataan pelaksanaan serta hasil pembangunan, pemupukan harga diri dan kepercayaan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri serta pemupukan rasa kesadaran dan solidaritas sosial. Konsep tersebut diperkuat rumusan pemikiran Cary (Iskandar, 2001: 228) bahwa "*participation results from sufficient concensus concerning the desirability and the direction of change*". Cary menekankan bahwa tekanan utama partisipasi warga masyarakat adalah pada kebersamaan atau saling memberikan sumbangan akan kepentingan dan masalah-masalah bersama yang tumbuh dari kepentingan dan perhatian individu warga masyarakat itu sendiri. Partisipasi tidak lain adalah hasil konsensus sosial warga masyarakat akan arah perubahan sosial yang mereka harapkan.

Sedangkan menurut Surachmad (Ndraha, 2003: 68) partisipasi adalah: "Perwujudan sikap dan tingkah laku positif masyarakat dalam kerja sama atau mengambil bagian terhadap pencapaian tujuan bersama atas dasar tanggung jawab pembangunan yang bersumber dari kesadaran hak dan kewajiban". Makna ini menunjukkan masyarakat harus mempunyai kesempatan berpartisipasi, bukan saja dalam mengambil keputusan-keputusan khusus tetapi juga dalam hal merumuskan suatu tujuan yang telah ditetapkan atas dasar hak dan kewajiban bersama. Jika tidak demikian maka sangatlah besar bahayanya, yaitu masyarakat akan menjadi korban dari keputusan-keputusan politik yang diambil (yang terlepas dan di luar kepentingan rakyat itu sendiri). Dengan kata lain, masyarakat tidak boleh dipandang/diperlakukan sebagai objek pembangunan belaka. Pembangunan masyarakat harus memperlakukan manusia seutuhnya.

Lebih lanjut menurut Koentjaraningrat (2000: 78) partisipasi mengandung pengertian: "Partisipasi terutama pada rakyat di pedesaan yang sedang membangun masih belum ada suatu pengertian yang jelas. Seringkali disamakan dengan frekuensi tinggi, turut sertanya masyarakat kelurahan dalam semua aktivitas bersama-sama, partisipasi rakyat dalam pembangunan dan pelestarian hasil-hasil pembangunan ini menyangkut dua tipe yaitu; partisipasi dalam aktifitas bersama, dalam proyek-proyek pembangunan yang khusus dan partisipasi sebagai individu diluar aktivitas bersama dalam pembangunan".

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa partisipasi dalam pembangunan kelurahan/desa secara struktur ke atas perlu dibangkitkan terlebih dahulu oleh pihak lain. Pihak lain tersebutlah yang mengambil prakarsa dan masyarakat diminta atau diberi kesempatan berpartisipasi. Berbagai sumber mengatakan, penggerakan partisipasi pembangunan merupakan salah satu sasaran pembangunan itu sendiri. Pembangunan masyarakat di arahkan pada perbaikan kondisi hidup masyarakat sebagai upaya untuk mengubah keadaan dari kurang dikehendaki menuju pada keadaan yang lebih baik, sehingga perbaikan kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat mengintegrasikan

kehidupan masyarakat itu ke dalam kehidupan bangsa sehingga mampu untuk memberi sumbangan sepenuhnya bagi kemajuan nasional.

Hamidjojo (Sastropetro, 1988: 32) menjelaskan jenis-jenis partisipasi masyarakat sebagai berikut: pertama, partisipasi buah pikiran yaitu kemampuan masyarakat untuk menyampaikan pengetahuan dan pengalaman, untuk mencapai mufakat atas berbagai masalah-masalah yang dihadapi baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan suatu proyek pembangunan. Kedua, partisipasi keterampilan yaitu partisipasi kelakuan masyarakat dalam penerahan keterampilan dalam pelaksanaan pembangunan. Ketiga, partisipasi tenaga yaitu partisipasi dalam bentuk ini dapat dilihat secara nyata melalui sumbangan tenaga kasar yang bersifat fisik. Keempat, partisipasi harta benda yaitu partisipasi dalam hal kemampuan masyarakat memberikan atau menyumbangkan hartanya dengan tujuan untuk meringankan beban bersama dan untuk kepentingan bersama. Kelima, partisipasi uang yaitu partisipasi dalam hal sumbangan yang bentuk uang sebagai wujud kemampuan masyarakat dalam memberikan swadaya gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan di lingkungannya.

Berdasarkan beberapa konsep dan/atau teori yang telah disampaikan sebelumnya, dalam konteks penelitian ini dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan mulai dari awal hingga akhir baik langsung maupun tidak langsung di segenap aktivitas berkehidupan dalam tataran sistem sosial hingga berpemerintahan dengan penerahan kemampuan sukarela yang dapat diberikan seorang individu maupun suatu komunitas dari totalitas dirinya (*self-organizing*) kepada pihak dan atau aktivitas di luar serta dalam dirinya, dimana unsur, ciri, sifat dan wujudnya bersumber dari inisiatif kesadaran diri yang tanggap (merasa ikut terpenggil baik nurani dan pikiran) tanpa ada paksaan (kerelaan dan rasa ikut memiliki) dan tekanan atau rekayasa imbalan. Inisiatif tersebut berbasis *power of community* atas berkesinambungannya kegiatan yang menyumbangkan sumber daya dalam sub variabel: partisipasi pemikiran, partisipasi nurani dan partisipasi materi.

Sedangkan proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) adalah musyawarah yang diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJP Nasional untuk pusat dan RPJPD untuk daerah yang diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintah dengan mengikutsertakan masyarakat. Mengingat dalam penelitian ini dilakukan pada lokus tingkat kecamatan maka musrenbang yang dimaksud adalah musyawarah yang dilakukan dalam rangka penyusunan RKPD yang dihadiri selain oleh unsur pemerintah juga mengikutsertakan dan menyerap aspirasi masyarakat terkait. Dengan sub variabel: penyusunan formulasi berstrategi, implementasi berkomitmen pembaharuan, periksa dan analisis, serta tindakan.

C. METODE

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat terhadap proses musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, dimana dalam tujuan tersebut terdapat makna untuk mencari hubungan diantara variabel-variabel penelitian, oleh karena itu metode penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanasi (penjelasan).

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, yaitu data-data yang diperlukan berupa angka atau narasi yang diangkakan melalui proses pengkodean yang selanjutnya digunakan untuk menguji hipotesis secara statistik.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.

Jumlah unit analisis secara lengkap dapat dilihat pada tabel 1.

TABEL 1
UNIT ANALISIS

No.	Kategori	Jumlah
1.	Kapolsek	1
2.	Danramil	1
3.	Pimpinan Puskesmas	1
4.	Kepala KUA	1
5.	Kepala Cabang Dinas Kecamatan	
6.	Perwakilan Desa dan Kelurahan @ 5 orang per desa/kelurahan (jumlah desan dan kelurahan adalah 25 desa/kelurahan): - Lurah dan Kepala Desa - Kasi Ekbang kelurahan - Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) - Tokoh Masyarakat - Tokoh Pemuda	125
	Jumlah	130

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: penyebaran angket/kuesioner, studi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Dalam penelitian ini, instrumen utama yang digunakan adalah kuesioner atau angket yang format jawabannya dalam skala *Likert* (data ordinal).

Pengolahan data dilakukan dengan tahap sebagai berikut: (a) Pengecekan yaitu melakukan pengecekan terhadap setiap jawaban yang didapat dari responden dan memeriksa tata cara memasukkan data dalam tabel; (b) *Coding* yaitu memberikan kode jawaban responden, jawaban yang mendukung pokok permasalahan diberikan kode empat sedangkan yang tidak mendukung diberikan kode satu; (c) *Tabulating* yaitu memasukkan data dalam tabel yang telah dibuat; dan (d) *Scoring*, yaitu langkah pemberian skor terhadap tanggapan yang diberikan oleh responden sebagai alat analisis deskriptif. Penafsiran hasil penelitian ditentukan dengan kriteria seperti terlihat dalam tabel 2.

TABEL 2
KRITERIA PENILAIAN

Persentase	Kriteria Penilaian
81,25% - 100%	Baik
62,50% - 81,24%	Cukup Baik
43,75% - 62,49%	Kurang Baik
25,00% - 43,74%	Tidak Baik

Sedangkan analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik statistik tertentu dengan harapan memperoleh hasil yang mampu menjawab pokok permasalahan penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis untuk menguji hipotesis adalah dengan menggunakan statistik parametrik.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bagian ini akan disajikan data dan hasil pengolahan data dari penelitian yang penulis lakukan. Untuk mempermudah, maka penulis membaginya dalam dua bagian besar sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti.

1. Partisipasi Masyarakat

Variabel partisipasi masyarakat terdiri dari 3 (tiga) sub variabel, yaitu partisipasi pemikiran, partisipasi nurani, dan partisipasi materi. Masing-masing sub variabel diteliti melalui beberapa indikator yang diwujudkan dalam bentuk pernyataan yang harus ditanggapi oleh responden. Adapun data hasil penelitian untuk variabel partisipasi masyarakat dapat dilihat pada tabel 3.

TABEL 3
TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT

No.	Pernyataan	SS		S		KS		TS		Jumlah		%	Kategori
		f	S	f	S	f	S	f	S	f	S		
1	Permintaan ide dari pihak kecamatan dalam kegiatan musrenbang.	17	68	56	168	40	80	12	12	125	328	65,60	Cukup Baik
2	Permintaan ide dari pihak kecamatan dalam melahirkan program pembangunan.	10	40	57	171	45	90	13	13	125	314	62,80	Cukup Baik
Jumlah/persentase/kategori partisipasi pemikiran										250	642	64,20	Cukup Baik
3	Perasaan memiliki atas hasil pembangunan.	11	44	39	117	57	114	18	18	125	293	58,60	Kurang Baik
4	Sikap dan kerjasama dalam kegiatan musrenbang.	13	52	43	129	49	98	20	20	125	299	59,80	Kurang Baik
Jumlah/persentase/kategori partisipasi nurani										250	592	59,20	Kurang Baik
5	Ketersediaan waktu untuk menghadiri musrenbang.	9	36	30	90	57	114	29	29	125	269	53,80	Kurang Baik
6	Pemberian dukungan data dan informasi dalam musrenbang.	8	32	33	99	60	120	24	24	125	275	55,00	Kurang Baik
Jumlah/persentase/kategori partisipasi materi										250	544	54,40	Kurang Baik
Jumlah/persentase/kategori Variabel Partisipasi Masyarakat										750	1.778	59,27	Kurang Baik

Dari tabel 3 diperoleh nilai persentase rata-rata tanggapan responden sebesar 64,2%. Apabila nilai ini dikaitkan dengan tabel 2 tentang kriteria penilaian maka berada pada interval cukup baik, artinya bahwa partisipasi pemikiran yang diberikan oleh masyarakat dalam kegiatan musrenbang di Kecamatan Kapuas cukup baik.

Partisipasi pemikiran yang cukup baik dari peserta musrenbang juga diakui oleh Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Kapuas yang telah menjabat lebih dari 7 tahun dalam wawancara dengan peneliti yang menyatakan bahwa sumbangan pemikiran/ide banyak diberikan oleh peserta musrenbang khususnya dari perangkat desa/kelurahan dan tokoh masyarakat. Namun demikian, tokoh pemuda rata-rata hanya diam dan selalu setuju saja tentang hasil yang berupa program dan rencana yang diajukan oleh peserta musrenbang yang lain.

Kemudian, dari tabel 3 diperoleh juga informasi mengenai partisipasi nurani. Berdasarkan tanggapan responden, diperoleh persentase rata-rata sebesar 59,2%. Apabila nilai persentase tersebut dikaitkan dengan tabel 2 tentang kriteria penilaian maka berada pada interval kurang baik, artinya partisipasi nurani yang diberikan oleh peserta musrenbang di Kecamatan Kapuas masih kurang baik.

Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dengan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan menyatakan bahwa selama ini ia telah mengikuti 6 kali kegiatan musrenbang di Kecamatan Kapuas dan menurutnya sejauh ini partisipasi nurani dari peserta musrenbang dapat dilihat dari hasil akhir yang berupa rencana atau program yang merupakan kesepakatan dari seluruh peserta sehingga diharapkan secara tidak langsung seluruh peserta dapat merasa ikut memiliki terhadap program atau rencana yang telah ditetapkan bersama.

Data pada tabel 3 juga memberikan informasi mengenai partisipasi materi. Persentase rata-rata tanggapan responden untuk indikator partisipasi materi adalah 54,4%. Apabila nilai persentase tersebut dikaitkan dengan tabel 2 tentang kriteria penilaian maka berada pada interval kurang baik, artinya partisipasi materi yang diberikan oleh peserta dalam kegiatan musrenbang di Kecamatan Kapuas kurang baik.

Hal serupa juga diakui oleh Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Kapuas dalam wawancara dengan peneliti bahwa partisipasi materi yang berupa kesediaan dalam memberikan data dan informasi di lapangan hanya dilakukan oleh perangkat desa/kelurahan saja, hal ini mungkin dikarenakan mereka dianggap lebih mengetahui dan memiliki data yang akurat tentang desa/kelurahan mereka dibandingkan dengan peserta musyawarah yang lain.

Jika nilai rata-rata persentase untuk ketiga indikator tersebut diakumulasikan, maka diperoleh nilai sebesar 59,27% yang jika dikaitkan dengan tabel 2 tentang kriteria penilaian maka termasuk ke dalam kategori kurang baik. Artinya partisipasi masyarakat baik partisipasi pemikiran, nurani maupun materi dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Kapuas masih kurang baik.

Berdasarkan penjelasan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, hambatan-hambatan yang ditemui dalam partisipasi masyarakat menurut adalah: pertama, tokoh pemuda yang diundang dalam forum musrenbang kecamatan sangat jarang memberikan masukan/ide karena mereka menganggap pendapat yang lebih tua lebih tepat karena mereka lebih mengetahui kondisi desa/kelurahan mereka. Kedua, terbatasnya data dan informasi yang akurat yang dibawa oleh para peserta musrenbang membuat pihak kecamatan mengalami kesulitan untuk memperjuangkan suatu program yang telah menjadi kesepakatan bersama yang nantinya akan dibawa ke dalam musrenbang kabupaten.

2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Berikut disampaikan hasil penelitian mengenai proses musyawarah perencanaan pembangunan yang diukur melalui sub variabel penyusunan formulasi berstrategi, implementasi berkomitmen pembaharuan, periksa dan analisis serta tindakan.

TABEL 4
TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN

No.	Pernyataan	SS		S		KS		TS		Jumlah		%	Kategori
		f	S	f	S	f	S	f	S	f	S		
7	Identifikasi data dan informasi sebagai awal kegiatan musrenbang.	23	92	56	168	37	74	9	9	125	343	68,60	Cukup Baik
8	Gambaran awal dari pemerintah tentang program pembangunan.	16	64	48	144	49	98	12	12	125	318	63,60	Cukup Baik
Jumlah/persentase/kategori penyusunan formulasi berstrategi										250	661	66,10	Cukup Baik
9	Penawaran dari pemerintah untuk mengajukan program lain.	14	56	45	135	49	98	17	17	125	306	61,20	Kurang Baik
10	Penampungan rencana program lain dari masyarakat oleh aparat kecamatan.	14	56	54	162	44	88	13	13	125	319	63,80	Cukup Baik
Jumlah/persentase/kategori implementasi berkomitmen										250	625	62,50	Cukup Baik
11	Peninjauan secara adil oleh pemerintah atas usulan program dari peserta.	19	76	33	99	43	86	30	30	125	291	58,20	Kurang Baik
12	Analisis atas hasil rekomendasi rencana dari peserta.	21	84	39	117	41	82	24	24	125	307	61,40	Kurang Baik
13	Pencatatan usulan dari peserta oleh penyelenggara kegiatan.	17	68	38	114	64	128	6	6	125	316	63,20	Cukup Baik
Jumlah/persentase/kategori periksa dan analisis										375	914	60,93	Kurang Baik
14	Perbaikan usulan jika dianggap tidak sesuai dengan komitmen bersama.	5	20	41	123	62	124	17	17	125	284	56,80	Kurang Baik
15	Penetapan akhir merupakan kesepakatan bersama seluruh peserta.	21	84	33	99	49	98	22	22	125	303	60,60	Kurang Baik
Jumlah/persentase/kategori sub tindakan										250	587	58,70	Kurang Baik
Jumlah/persentase/kategori Variabel Musyawarah Perencanaan Pembangunan										1.125	2.787	61,93	Kurang Baik

Berdasarkan tabel 4 diperoleh nilai persentase rata-rata tanggapan responden untuk sub variabel penyusunan formulasi berstrategi sebesar 66,1%. Jika nilai ini dikaitkan dengan tabel 2 tentang kriteria penilaian maka berada pada interval cukup baik. Artinya proses musrenbang yang diselenggarakan di Kecamatan Kapuas sudah diawali dengan pengidentifikasian data dan informasi serta telah ada acuan rencana standar awal yang dibuat oleh pemerintah kecamatan untuk memperlancar proses berjalannya musyawarah.

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Kapuas tentang penyusunan formulasi berstrategi menyatakan bahwa selama ini dalam kegiatan musrenbang kecamatan memang sudah berdasarkan data dan informasi yang akurat, hal ini bertujuan agar mempermudah program dan rencana tersebut untuk diperjuangkan dalam musrenbang kabupaten selanjutnya.

Kemudian, dari tabel 4 terlihat bahwa nilai persentase rata-rata tanggapan responden untuk sub variabel implementasi berkomitmen pembaharuan adalah 62,5%. Jika nilai ini dikaitkan dengan tabel 2 tentang kriteria penilaian maka berada pada interval cukup baik. Artinya proses musrenbang yang diselenggarakan di Kecamatan Kapuas sudah memberikan kesempatan kepada para peserta musrenbang untuk mengajukan rencana di luar rancangan dan standar awal yang diajukan oleh pemerintah kecamatan.

Hal ini juga didukung dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Kapuas yang menyatakan bahwa sejauh ini dalam kegiatan musrenbang, pemerintah kecamatan memang menawarkan program atau rencana untuk

dijadikan sebagai acuan awal, akan tetapi semuanya dikembalikan lagi kepada para peserta forum musyawarah karena mengingat para peserta musrenbang membawa hasil dari musrenbang desa/kelurahan masing-masing.

Selain itu, data pada tabel 4 menunjukkan bahwa nilai persentase rata-rata tanggapan responden untuk sub variabel periksa dan analisis sebesar 60,93%. Jika nilai ini dikaitkan dengan tabel 2 tentang kriteria penilaian maka berada pada interval kurang baik. Artinya rekomendasi program dan rencana yang diajukan oleh para peserta musrenbang masih kurang melalui tahapan pembahasan dan analisis bersama yang disesuaikan dengan biaya, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di setiap desa dan kelurahan.

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Kapuas yang menyatakan bahwa kegiatan musrenbang selama ini layaknya seperti forum musyawarah biasa dan bertujuan untuk menyatukan pendapat dan pandangan tentang rencana/program yang dibawa dari hasil musrenbang desa dan kelurahan masing-masing, selanjutnya akan dipilih program apa saja yang dianggap betul-betul dapat mewakili keseluruhan desa dan kelurahan yang tentunya disesuaikan dengan kondisi alam dan ketersediaan sumber daya manusianya.

Selanjutnya, dari data pada tabel 4 terlihat nilai persentase rata-rata tanggapan responden untuk sub variabel tindakan sebesar 58,7%. Jika nilai ini dikaitkan dengan tabel 2 tentang kriteria penilaian maka berada pada interval kurang baik. Dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Kapuas yang menyatakan bahwa selama ini tindakan yang diambil dalam kegiatan musrenbang dapat dilihat dari rekomendasi program yang diajukan oleh para peserta akan dilakukan perbaikan, apabila dianggap tidak sesuai dengan komitmen bersama dan hasil akhir dari kegiatan musrenbang kecamatan yang berupa program merupakan kesepakatan bersama seluruh peserta yang selanjutnya dijadikan sebagai prioritas program untuk dibawa pada kegiatan musrenbang kabupaten.

Dari informasi yang berasal dari keempat indikator yang diuji, maka diperoleh skor penelitian untuk variabel proses musyawarah perencanaan pembangunan sebesar 62,06% yang dikategorikan kurang baik. Artinya bahwa proses berjalannya musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Kapuas yang dimulai dari pengidentifikasian data dan informasi hingga penetapan akhir dari kegiatan musrenbang yang berupa program/rencana untuk selanjutnya akan dibawa ke forum musrenbang kabupaten masih dikategorikan kurang baik.

Adapun hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan proses musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Kapuas menurut Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan adalah: pertama, data dan informasi yang kurang lengkap terkadang mempersulit pengidentifikasian apakah program yang dibawa dari hasil musrenbang desa dan kelurahan betul-betul dapat diprioritaskan atau tidak. Kedua, sikap arogan yang masih sering ditemui dari peserta musrenbang terkadang menghambat jalannya pencapaian kata sepakat dalam penentuan program yang menjadi prioritas yang merupakan hasil akhir dari kegiatan musrenbang kecamatan.

3. Hubungan antara Partisipasi Masyarakat dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Untuk mengetahui besarnya hubungan antara variabel partisipasi masyarakat dengan musyawarah perencanaan pembangunan, penulis menggunakan analisis koefisien korelasi *product moment*. Dari hasil analisis koefisien *product moment* yang telah dilakukan, yaitu mencari besarnya hubungan antara variabel X dengan variabel Y diperoleh hasil

sebesar 0,648 atau sebesar 64,8%. Nilai koefisien korelasi ini apabila dikaitkan dengan pedoman interpretasi koefisien korelasi yang dikemukakan oleh Sugiyono, maka menunjukkan tingkat hubungan yang kuat.

4. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Untuk mengetahui besarnya pengaruh antara variabel partisipasi masyarakat (X) terhadap variabel proses musyawarah perencanaan pembangunan (Y) maka digunakan analisis regresi linier, dengan menggunakan persamaan sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono (2006: 237-241) yaitu: $Y = a + bX$. Dari hasil perhitungan maka diperoleh persamaan linier sederhananya sebagai berikut: $Y = 9,01 + 0,94X$.

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi linier maka dapat dilakukan prediksi untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel partisipasi masyarakat (X) terhadap variabel proses musyawarah perencanaan pembangunan (Y). Jika partisipasi masyarakat (X) sama dengan nol (0) maka nilai proses musyawarah perencanaan pembangunan (Y) adalah sebesar 9,01. Dari pernyataan yang telah diuraikan maka kita dapat mengatakan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat akan meningkatkan pelaksanaan proses musyawarah perencanaan pembangunan menjadi lebih baik, karena koefisien regresi (b) bernilai positif (+0,94).

Mengingat besarnya hubungan antara partisipasi masyarakat terhadap proses musrenbang sebesar 64,8%, maka meningkat atau menurunnya partisipasi masyarakat dapat memberikan pengaruh terhadap proses musrenbang yang besarnya dapat dilihat dari persamaan $Y = 9,01 + 0,94X$ dan sisanya ditentukan oleh keadaan lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari uraian yang telah dikemukakan di bab-bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: pertama, partisipasi masyarakat khususnya partisipasi dari para peserta musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Kapuas termasuk dalam kategori kurang baik, artinya partisipasi masyarakat baik partisipasi pemikiran, nurani maupun materi dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Kapuas masih dikatakan kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya responden yang menjawab kurang setuju atau bahkan tidak setuju atas pernyataan kuesioner dengan indikator: rasa ikut memiliki, kesadaran sikap dan mental bekerjasama secara sukarela, kesediaan dalam memberikan data dan informasi serta kesediaan waktu untuk mengikuti kegiatan musrenbang di Kecamatan Kapuas.

Kedua, proses musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Kapuas masih termasuk dalam kategori kurang baik, artinya bahwa proses berjalannya musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Kapuas masih dilakukan dengan kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya responden yang menjawab kurang setuju atau bahkan tidak setuju atas pernyataan Kuesioner dengan indikator: menawarkan kesempatan untuk mengajukan rencana di luar rancangan dan standar awal, periksa dan pelajari rekomendasi sebelumnya, analisis, perekaman dan solusi alternatif, perbaikan serta penetapan akhir yang berupa program dari kegiatan musrenbang.

Ketiga, pengaruh partisipasi masyarakat terhadap proses musyawarah perencanaan pembangunan berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi linier dapat diartikan bahwa, peningkatan partisipasi masyarakat akan meningkatkan pelaksanaan proses musyawarah perencanaan pembangunan menjadi lebih baik.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka disarankan hal-hal sebagai berikut: pertama, partisipasi pemikiran yang berupa ide/masukan dari tokoh pemuda diharapkan lebih

ditingkatkan lagi, yaitu dapat dilakukan dengan memberikan kesadaran bahwa sumbangan pemikiran dari tokoh pemuda biasanya akan melahirkan ide-ide yang baru dan lebih mewarnai dalam penyusunan perencanaan pembangunan di desa maupun kelurahan.

Kedua, pemerintah diharapkan untuk lebih aktif dalam mensosialisasikan dan melakukan pendekatan secara kekeluargaan terhadap masyarakat yang apatis dengan program pembangunan yang akan masuk ke desa/kelurahan. Adapun pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan merangkul tokoh adat maupun tokoh masyarakat yang sangat dituakan dan dihormati oleh penduduk setempat.

Ketiga, proses berlangsungnya musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Kapuas yang masih berjalan kurang baik disarankan agar dapat lebih ditingkatkan lagi menjadi baik. Adapun caranya adalah dengan selalu merumuskan formulasi rencana pembangunan yang selaras dan terpadu baik dari keinginan rakyat (*bottom up planning*) maupun dengan rencana pemerintah (*top down planning*) melalui penyusunan formulasi program pembangunan yang strategis sesuai prinsip *good governance*.

REFERENSI

- Badri, Sofwan. 1983. *Konsep-Konsep Dasar Administrasi Negara dan Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Bryant dan White, Coralie Louise. 1987. *Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang*. Simatupang (Penterjemah). Jakarta: LP3ES.
- Friedmann, John. 1987. *Retracking America, A Theory of Transactive Planning*. New York: Doubleday.
- Iskandar, Jusman. 2001. *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Kalangan Sendiri, STIA LAN.
- Koentjaraningrat. 2000. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Priata, Westra. 1983. *Ensiklopedia Administrasi*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Riyadi dan Bratakusumah, Deddy Supriady. 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah, Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Robbins, Stephen P. 1998. *Teori Organisasi Struktur, Desain dan Aplikasi*, Yusuf Udaya (Penterjemah). Jakarta: Arcan.
- Sastropoetro, Santoso. 1988. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soeprapto, HR, Riyadi. 2000. *Administrasi Pembangunan*. Malang: Universitas Malang Badri.
- Suwatno. dkk. 2002. *Manajemen Moderen; Teori dan Aplikasi*. Bandung: Zafira.
- Syafrudin, Ateng. 1993. *Perencanaan Administrasi Pembangunan Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Tarigan, Robinson. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1978. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- . 1996. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang *Perencanaan Pembangunan Nasional*.